

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2015. *Reforma Agraria di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arliman S, Laurensius. 2015. *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi. 2016. *Hukum Agraria: Diktat Hukum Agraria*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Harsono, Boedi. 2013. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah, Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kanter dan Sianturi. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: AHM-PTHM.
- Kusuma, I Made Hendra. 2021. *Problematik Notaris dalam Praktik*. Alumni: Bandung.
- Maria R. Ruwastuti, Noer Fauzi, dan Dianto Bachriadi. 1997. *Penghancuran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah: Sistem Penguasaan Tanah Sengketa dan Politik Hukum Agraria*. Bandung: KPA.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moechtar, Oemar. 2017. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nico. 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. 1982. *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. OReilly.
- _____. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuat Akta*. Surabaya: Mandar Maju.
- Parlindungan,A.P. 1991. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju.
- Prajitno, AA. Andi. 2010. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris di Indonesia*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Projudikoro, R. Wirjojo. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Purnamasari, Irma Devita. 2010. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*. Bandung: Kaifa.
- Rahman, Abd. dan Baso Madiong. 2016. *Politik Hukum Pertanahan – Suatu Kajian Historis dan Yuridis*. Jakarta: Bosowa.
- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media.
- _____. 2016. *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun*. Depok: Kencana.
- _____. 2016. *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif, Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Sembiring, Julius. 2018. *Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara*. Jakarta: Kencana.

- Siyoto, Sandu dan Muhammad Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerodjo, Irawan. 2003. *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- _____. 2014. *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL): Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Soesanto, R. 1982. *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris: Wakil Notaris (sementara)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soesilo, R. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sri Mamudji et al. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sri Winarsi, et.al. 2021. *Seri Hukum Agraria: Prinsip Prioritas dalam Sistem Hukum Agraria Indonesia*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Suyanto, H. 2019. *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Tobing, G.H.S Lumban. 1980. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Utomo, Budi. 2013. *Hukum Perdata*. Yogyakarta: Sejahtera.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winangun, Y. Wartaya. 2006. *Tanah: Sumber Nilai Hidup*. Yogyakarta: Kanisius.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

_____. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- _____. Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043.
- _____. Undang-Undang tentang Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.
- _____. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- _____. Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, PP No. 40 Tahun 1996, LN No. 58 Tahun 1996, TLN No. 3643.
- _____. Peraturan Pemerintah tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. PP No. 18 Tahun 2021. LN No. 28 Tahun 2021, TLN No. 6630.
- _____. Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria. Perpres No. 86 Tahun 2018. LN No. 172 Tahun 2018.
- _____. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Permen Agraria/BPN No. 9 Tahun 1999.
- _____. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Perkaban No. 1 Tahun 2010.
- _____. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah. Permenkeu No. 186/PMK.06/2009 dan Perkaban Nomor 24 Tahun 2009.

Putusan Pengadilan

Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.

_____. Putusan 1122 K/Pid.Sus/2013.

_____. Putusan Nomor 105/PDT/2019/PT BDG.

_____. Putusan Nomor 181/PDT/2020/PT BDG.

_____. Putusan 147 PK/Pid.Sus/2014.

_____. Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor Register: PDS-04/Fd.1/07/2012. Akta Pelepasan Hak Nomor 38.

Jurnal

- Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, "Tanah Negara dan Wewenang Pemberian Haknya", *Jurnal Keadilan* 6 (1), 2012.
- Dian Aries Mujiburohman, "Problematika Pengaturan Tanah Negara Bekas Hak yang Telah Berakhir", *Jurnal Bhumi* Volume 2 No. 2, November 2016.
- Fitria Hady, "Keabsahan Pengembalian Kerugian Negara Melebihi Nilai dan Pengembalian Aset Pihak Ketiga (Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 1122 K/Pid.Sus/2013 dengan terpidana Isnain Ibrahim dan Adem Mustofa)" dalam buku *Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi*, (Depok: Klinik Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015),
- Irene Dwi Enggarwati, "Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang Diperiksa oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu pada Akta Otentik", *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 2015,
- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat, I Wayan Parsa dan I Gusti Ketut Ariawan, "Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik," *Acta Comitas* Volume 1, 2018.
- Nurhasan Ismail, "Rechtsverwerking dan Pengadopsiannya dalam Hukum Tanah Nasional," *Jurnal Mimbar Hukum* 19 (2), Juni 2007.
- Oloan Sitorus, "Penataan Hubungan Hukum Dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Agraria: Studi Awal Terhadap Konsep Hak Atas Tanah dan Ijin Usaha Pertambangan", *Jurnal Bhumi* 2 (1), Mei 2016
- Rachseria Isneni Hakim, Yani Pujiwati, Betty Rubiati, "Hak Prioritas Dalam Perolehan Tanah Hak Guna Bangunan yang Habis Jangka Waktunya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal," *Acta Diurtal Journal* 1 (2), Juni 2018.
- Rahmad Hendra, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Hukum* 3 (1), 2012.
- Ratnawati, Dwi Heny dan Djauhari, "Pelaksanaan Akta Pelepasan Hak Sebagai Alas Hak Untuk Mengajukan Permohonan Peralihan dan Perubahan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya Telah Berakhir di Kabupaten Brebes," *Jurnal Akta* 5(1), Maret 2018.

Rubiati, Betty, Yani Pujiwati dan Rachseria Isneni Hakim, "Hak Prioritas Dalam Perolehan Tanah Hak Guna Bangunan yang Habis Jangka Waktunya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal," *Acta Djurnal* Volume 1 No. 2, Juni 2018.

Ria Fitri, "Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20 (3), Desember 2018.

Wawancara

Wawancara dengan Budiono, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 17 Oktober 2020.

Wawancara dengan Bapak Suryohadi Wisnu, Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, pada tanggal 4 Juni 2021

Wawancara dengan Ibu Pudji Lestari, Mantan Notaris, pada tanggal 5 Juni 2021.

Wawancara dengan Bapak Robbyson Halim, Notaris dan Dosen Universitas Pelita Harapan, pada tanggal 1 Juni 2021.

Website

Cambridge Dictionary, s.v. "Research," <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/research>, tanggal 2 Juni 2021

The Law Dictionary, s.v. "Land," diakses dari <http://thelawdictionary.org/land/>, pada tanggal 12 April 2021.

The Law Dictionary, s.v. "Notary Public," diakses dari <http://thelawdictionary.org/notary-public/>, pada tanggal 20 April 2021.

The Law Dictionary, s.v. "Priority," diakses dari <http://thelawdictionary.org/priority/>, pada tanggal 20 April 2021.